KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PERS TAHUNAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2015

==========

Yang terhormat Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional

Ketua Komisi I dan para anggota DPR yang kami hormati

Sesepuh serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, baik di tanah air maupun di luar negeri

Pimpinan media massa dan hadirin yang terhormat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Mengawali pernyataan pers tahunan ini, ijinkanlah kami atas nama seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri mengucapkan Selamat Tahun Baru 2015. Mudah-mudahan tahun 2015 menjadi tahun yang penuh perdamaian dan membawa kesejahteraan bagi Indonesia dan bagi umat manusia di seluruh dunia.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Diplomat Indonesia atas segala kerja keras dan pengabdian yang terus dilakukan dimana pun berada.

Penghargaan yang sangat tinggi juga ingin kami sampaikan kepada Duta Besar Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014, yang telah berhasil membawa diplomasi Indonesia pada situasi seperti saat ini.

Tentu saja penghargaan tinggi yang sama juga ingin kami sampaikan kepada para Menteri Luar Negeri pendahulu kami, Duta Besar Hasan Wirajuda, Bapak Alwi Shihab dan kepada seluruh mantan diplomat yang dari hari ke hari telah merajut simpul-simpul diplomasi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai warga dunia yang baik, berkontribusi tinggi terhadap pembangunan dan perdamaian dunia.

Hadirin yang terhormat,

Pernyataan Pers Tahunan ini dilakukan dalam suasana duka karena musibah yang menimpa pesawat Air Asia QZ 8501. Ijinkan kami untuk menyampaikan duka cita yang sangat dalam kepada seluruh keluarga korban. Semua upaya telah dan akan terus dilakukan Pemerintah

Indonesia dalam menangani musibah ini. Ijinkan kami pula untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan dan kerja sama dari negara sahabat.

Ibu dan Bapak yang kami hormati

Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam visi misinya telah menegaskan tekad untuk merealisasikan ajaran Trisakti; yaitu menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan untuk mencapai tujuan tersebut.

Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dan akan menggunakan posisi strategis diantara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik.

Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat.

Diplomasi Indonesia akan membumi.

Dan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Tahun 2014 baru saja berakhir.

Di tahun 2014, secara umum, kita menyaksikan perdamaian dan keamanan dunia cukup stabil. Masyarakat internasional pada tingkatan tertentu berhasil menekan eskalasi konflik sehingga perang terbuka dapat dihindari.

Namun demikian, kita juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Berbagai kawasan di dunia saat ini masih diwarnai oleh konflik.

Dunia juga terus menghadapi tantangan keamanan tradisional seperti isu perlucutan senjata, non-proliferasi senjata nuklir, serta berbagai konflik yang terkait dengan sengketa perbatasan.

Ancaman terorisme seperti munculnya ISIS dan *Foreign Terrorist Fighters (FTF)* sangat membahayakan dan mengkhawatirkan dunia.

Ancaman lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah perdagangan manusia dan narkoba. Di Indonesia, kejahatan narkoba telah merusak kehidupan bangsa, termasuk generasi muda Indonesia. Setiap hari, setidaknya 40-50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. 4,5 juta orang menjalani proses rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, dan 1,2 juta sangat tergantung pada narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan menindak tegas kejahatan narkoba yang telah merusak bangsa secara masif ini.

Dengan prihatin kita juga menyaksikan berkembangnya wabah Ebola. Untuk mencegah agar tidak berkembang lebih luas kita memerlukan kerja sama intensif antar negara.

Sementara itu, di bidang ekonomi, krisis ekonomi dan keuangan global belum menunjukkan pemulihan yang sempurna. Oleh karena itu, merupakan kepentingan semua negara untuk berupaya memulihkan perekonomian dunia menjadi semakin baik di masa mendatang.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam konteks hubungan bilateral, sejauh ini Indonesia telah memiliki 18 kemitraan strategis atau komprehensif dengan negara sahabat.

Diplomasi perbatasan Indonesia juga telah meraih beberapa capaian. Pada tahun 2014 telah disepakati 3 segmen batas maritim baru dengan Singapura dan Filipina.

Di bidang perlindungan WNI, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui 3 pendekatan, yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan.

Dari sisi pencegahan (*prevention*), di akhir tahun 2014, Kemlu telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dengan lima perusahaan penyedia layanan selular untuk memberikan informasi nomor-

nomor telepon *hotline* Perwakilan RI terdekat, kepada WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Kemlu juga telah melakukan integrasi *database* WNI di luar negeri (e-Perlindungan) dengan *database* BMI yang dioperasikan oleh BNP2TKI (Sisko-TKLN). Dengan demikian, berbagai permasalahan WNI di luar negeri, dimana 60%-nya adalah BMI, diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih cepat di masa mendatang.

Pada tingkatan kawasan dan dunia internasional, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan, perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah berkontribusi aktif dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Terkait interaksi dengan mitra wicara, Indonesia juga terus berupaya untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN.

Diplomasi Indonesia aktif pada *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) maupun sebagai peninjau pada *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG), serta *Pacific Island Development Forum* (PIDF).

Di lain pihak, konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina terus dilakukan antara lain dengan menjadi tuan rumah *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD) II, Maret 2014.

Kerja sama pembangunan kapasitas *(capacity building)* maupun bantuan peralatan juga dilakukan melalui kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular*. Selama 2000-2014, Indonesia telah melakukan 405 program pembangunan kapasitas kepada sebanyak 4.402 peserta yang datang dari 91 negara berkembang.

Diplomasi Indonesia juga berkontribusi dalam pengembangan demokrasi, seperti melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Forum*.

Indonesia tanpa lelah memperjuangkan saling pengertian antar-budaya dan *people-to-people contact* di berbagai forum internasional, seperti melalui keketuaan dan ketuan-rumahan Indonesia pada *United Nations Alliance of Civilizations* (UN-AOC) *Global Forum* ke-6 di Bali, Agustus 2014.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Tahun 2014 merupakan tahun pemilihan umum bagi Indonesia. Indonesia kembali dapat menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Melalui pemilihan umum yang demokratis, Indonesia telah memilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pimpinan nasional untuk periode 2014-2019.

Dari sejak hari pertama masa pemerintahan baru, prioritas-prioritas nasional telah ditetapkan. Kejelasan prioritas nasional memudahkan setiap diplomat Indonesia menjalankan tugasnya. Dalam dua bulan pertama pemerintahan baru, Indonesia telah aktif memberikan kontribusi dalam 12 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Presiden Jokowi juga telah melakukan pertemuan dengan 21 kepala negara/kepala pemerintahan asing.

Khusus dalam KTT ke-9 Asia Timur yang diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar**,** 13 November 2014, Presiden Indonesia telah menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang memiliki 5 pilar utama, yaitu (i) membangun budaya maritim; (ii) penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; (iii) membangun infrastruktur dan konektifitas maritim; (iv) kerja sama maritim melalui diplomasi dan (v) pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Pada tataran Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri RI telah menerima kunjungan empat Menteri Luar Negeri asing, melakukan kunjungan bilateral ke luar negeri, melakukan sejumlah pertemuan bilateral disela-sela KTT-KTT tersebut dan mulai aktif dalam pertemuan informal MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turki dan Australia).

Hadirin yang terhormat,

Kita beranjak ke tahun 2015.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Jokowi, dalam 5 (lima) tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan pada:

Menjaga kedaulatan Indonesia

Diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara. Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan pada tahun 2015. Khusus untuk penyelesaian batas maritim, Indonesia telah menyusun *roadmap* perundingan perbatasan. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kehadirannya di wilayah perbatasan-

Meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia

Perlindungan warga negara (termasuk buruh migran) dan Badan Hukum Indonesia akan terus ditingkatkan. Indonesia hanya akan melakukan kerja sama pengiriman buruh migran apabila (i) negara tujuan memiliki peraturan nasional yang mengatur perlindungan terhadap buruh migran asing; dan/atau (ii) Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang mengedepankan perlindungan buruh migran Indonesia.

Penguatan perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia juga akan dilakukan pada tingkat regional, termasuk mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Hal in i sejalan dengan Visi ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli.

Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

Meningkatkan diplomasi ekonomi

Kerja sama regional dan internasional di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari akan ditingkatkan. Pada tingkat bilateral, kerja sama maritim juga akan dikembangkan dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara sahabat.

Komitmen dan tekad Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum di laut dalam rangka memberantas *IUU Fishing* akan diteruskan. Sudah terlalu lama aktivitas *illegal* berlangsung di perairan Indonesia. Karena itu, *illegal fishing* harus dihentikan. Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan *IUU Fishing*.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga akan difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Pembangunan *deep sea ports* dan pengembangan *power plants* merupakan beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan dengan pihak asing.

Di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan ekspor ke *non-traditional* dan *untapped market* akan terus dilakukan. Indonesia tidak akan dapat menerima perlakuan diskriminasi terhadap komoditi Indonesia yang diperlakukan secara tidak adil dengan tuduhan tidak mendasar, seperti yang terjadi atas CPO Indonesia.

Upaya untuk menarik modal asing ke Indonesia juga akan terus dilakukan. Komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan perijinan dan membuat "*one stop service"* diyakini akan meningkatkan minat investor asing ke Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan *draft Bilateral Investment Treaty*, yang akan menjadi rejim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain.

Diplomasi Indonesia juga akan diarahkan pada upaya untuk mendukung kemandirian di bidang pangan dan di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan.

Diplomat Indonesia secara terus menerus akan diminta untuk menjadi "*marketers"* bagi Indonesia. Untuk memahami karakter pasar, diplomat harus turun ke lapangan.

Untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan diplomasi ekonomi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri akan membentuk "*Task Force* Diplomasi Ekonomi" yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Unit ini akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa Indonesia akan menarik diri dari dunia internasional. Dapat saya tegaskan bahwa Indonesia tidak akan menurunkan *engagement*-nya dengan dunia internasional.

Sebagai negara *middle power* dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang, demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara terbesar di ASEAN, anggota G-20, maka Indonesia akan terus memainkan perannya baik di kawasan maupun di dunia. ASEAN tetap merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga menginginkan satu tatanan dunia yang demokratis, semakin sempitnya *gap* kemakmuran antar-negara, pergaulan dunia yang saling menghormati dan dunia yang aman dan stabil.

Sesuai dengan mandat Konstitusi, maka Indonesia tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Bagi Indonesia, keamanan di kawasan merupakan hal mutlak yang harus ada. Oleh karena itu, melalui ASEAN, Indonesia akan terus aktif mendorong implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)* secara penuh dan efektif, serta diselesaikannya *Code of Conduct in The South China Sea (CoC)*. Untuk menjaga stabilitas kawasan, Indonesia mendesak semua negara agar menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia mengedepankan cara-cara damai dan menghormati prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Indonesia akan terus berperan aktif dalam pencapaian Masyarakat ASEAN dan menyiapkan visi Masyarakat ASEAN pasca 2015. Beberapa prioritas yang perlu segera dituntaskan dalam konteks ASEAN, antara lain *Protokol SEANWFZ*, dan penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Untuk mendukung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia akan mendorong penguatan kerja sama maritim dalam berbagai mekanisme di ASEAN.

Pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konperensi Asia Afrika (KAA). Peringatan kali ini merupakan momentum untuk membangkitkan kembali semangat kerja sama Selatan-Selatan dan kontribusi Selatan-Selatan terhadap dunia. Konperensi Asia Afrika merupakan simbol dari pembebasan terhadap penjajahan dan merupakan simbol kebangkitan negara-negara Asia Afrika. Makna dari Konperensi tersebut masih sangat relevan dengan dunia masa kini. Indonesia sangat mengharapkan dukungdan dan kerja sama negara – negara Asia Afrika demi suksesnya penyelenggaraan KTT dan peringan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Dalam kaitan ini, kami ingin mengingatkan kembali adanya satu isu yang perlu terus menerus mendapatkan dukungan dunia, yaitu masalah Palestina. Indonesia akan terus mendukung

perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina.

Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina di New York, 30 Desember 2014.

Untuk lebih mendekatkan diri dengan Palestina, selain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Amman, Yordania, Indonesia dalam waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah. Bantuan Indonesia kepada Palestina di bidang pembangunan kapasitas akan terus ditingkatkan.

Pada akhir 2015, Indonesia akan memulai keketuaan dalam IORA *(Indian Ocean Rim Association)*. Selama keketuaan, Indonesia akan memfokuskan dan mendorong kerja sama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara maritim.

Pasifik Selatan juga merupakan wilayah strategis bagi Indonesia. Selain kerja sama yang telah berjalan selama ini, Indonesia akan mengembangkan kerja sama baru, seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga serta budaya. Untuk mendukung program pembangunan kapasitas ini, Indonesia berkomitmen menyediakan dana sebesar US$ 20 juta kepada negara-negara di Pasifik selama kurun waktu 2015-2019.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang signifikan misi perdamaian dan keamanan PBB. Sejauh ini, Indonesia merupakan penyumbang 16 terbesar misi perdamaian yang melibatkan 1.843 personil. Kontribusi Indonesia ini akan ditingkatkan menjadi 4.000 personil sampai tahun 2019 atau dikenal dengan "*Vision 4000 Peacekeepers*."

Indonesia juga akan terus aktif dalam penanganan isu *irregular migration* melalui mekanisme kerja sama "Bali Process". Indonesia ingin menekankan kembali bahwa penanganan isu ini memerlukan kerja sama yang baik antara negara asal, negara transit dan negara tujuan. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, namun demikian terdapat kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga dunia.

Indonesia juga siap untuk terus memberikan kontribusi terhadap upaya global dalam memerangi terorisme.

Dengan berakhirnya MDGs tahun 2015, Indonesia akan berperan aktif dalam proses pembentukan Agenda Pembangunan pasca-2015 untuk memastikan dunia yang bebas dari kimiskinan ekstrim, serta menerapkan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.

Terkait perubahan iklim, Indonesia telah aktif berkontribusi dalam *Conference of the Parties* (COP) *to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-20 di Lima, Peru, dan akan melanjutkan kontribusi aktif dalam COP-21 di Paris, Perancis, untuk mempersiapkan kesepakatan baru mengenai perubahan iklim yang akan dibentuk tahun 2015, dan berlaku mulai tahun 2020.

Indonesia akan terus menggunakan aset bangsa seperti demokrasi dan pluralisme dalam diplomasi di masa mendatang.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2015 - 2017 menegaskan kembali pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen

dan kontribusi Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

Indonesia juga akan terus memperjuangkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Hadirin yang terhormat,

Guna mengoptimalkan hasil politik luar negeri, maka komunikasi dengan semua *stakeholders* menjadi suatu keharusan. Melalui *foreign policy breakfast* dan melalui forum-forum lainnya, diplomat-diplomat Indonesia akan dengan senang hati menerima kritik dan masukan untuk menjadikan diplomasi Indonesia lebih baik dan bermanfaat bagi rakyat di masa mendatang.

Ijinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini telah ikut mengkomunikasikan kebijakan terkait diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Besar harapan kami kerja sama yang baik ini dapat ditingkatkan di tahun 2015.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas kerja sama DPR RI, khususnya Komisi I sebagai mitra Kementerian Luar Negeri. Kami berkomitmen untuk meneruskan kemitraan yang lebih baik di masa depan.

Mari kita satukan seluruh kekuatan bangsa agar diplomasi Indonesia lebih kokoh dan membawa manfaat bagi rakyat Indonesia dan bagi dunia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

=======